

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERANCANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK MENGGALI GAGASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUTUR
DI KELURAHAN MLIPAK KECAMATAN WONOSOBO
PERIODE TAHUN 2018**

Tesis



Diajukan Oleh

SUKIRMAN

NOMOR MAHASISWA : 151302827

Kepada :

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHAYOGYAKARTA**

2019

**UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PBB DI KELURAHAN
KALIKAJAR KECAMATAN KALIKAJAR
PERIODE TAHUN 2018**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai
derajat Sarjana S -2
Program Studi Magister Manajemen**



Diajukan Oleh

**NGABIDIN
NOMOR MAHASISWA : 151302826**

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHAYOGYAKARTA**

2019

UNTUK MENGGALI GAGASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUTUR
DI KELURAHAN MLIPAK KECAMATAN WONOSOBO

TESIS

Sukirman

Nomor Mahasiswa : 151302827

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal November 2019

1.
Pembimbing I
2.
Pembimbing II
3.
Penelaah
4.
Penelaah

Yogyakarta, November 2019

MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHAYOGYAKARTA

Direktur,

Ketua Program Studi
Ilmu Ekonomi,

.....
NIP.

.....
NIP.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2018

Sukirman

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Menggali Gagasan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo”. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Sumber Daya Manusia STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Selama menyusun tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. John Suprihanto.MIM,Ph.D selaku Direktur Program MM STIE Widya Wiwaha yang telah memberikan kemudahan dan berbagai fasilitas dalam studi.
2. Prof.Dr.Abdul Halim MBA.Akt selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan arahan-arahan berkaitan dengan tesis ini.
3. Zulkifli.SE,MM selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama penyusunan tesis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program MM STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program MM STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
5. Keluargaku tercinta Bapak/Ibu yang semoga Allah merahmati keduanya, Istriku tercinta, serta anak-anakku, yang selalu mendoakan dan mendukung keberhasilan penulis.
6. Para Staf sekretariat administrasi dan perpustakaan Program MM STIE Widya Wiwaha, yang telah banyak membantu baik dalam proses administrasi maupun bahan-bahan/materi perkuliahan selama penulis menjalani masa kuliah hingga selesai tesis ini.
7. Bapak/Ibu warga Kelurahan Mlipak sebagai responden yang telah berkenan

memberikan data untuk kepentingan penyusunan tesis ini.

8. Teman-teman Manajemen angkatan 15.2D, terutama teman-teman satu bimbingan, terimakasih saling supportnya
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu terselesaikannya Tesis ini

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi maupun bagi orang lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta,

2019

SUKIRMAN

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan merupakan awal atau dasar perencanaan dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah pondasi penting bagi perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat dituntut untuk aktif memberikan ide dan gagasan untuk keberlangsungan pembangunan di daerahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat deskriptif, yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan Analisis Univariat dengan menghitung distribusi frekuensi dan Analisis Bivariat dengan menghitung nilai Chi-Kuadrat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat baru mencapai pada tingkatan Konsultasi atau masih sampai pada derajat Pertanda Partisipasi, dimana Musrenbang tingkat kelurahan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan namun responden meragukan bahwa pemerintah menjamin penerimaan usulan tersebut. Tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat komunikasi, dan tingkat kepemimpinan masing-masing memiliki hubungan dengan keaktifan masyarakat berpartisipasi, sedangkan jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lama tinggal tidak mempunyai hubungan yang berarti dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Partisipasi Masyarakat	8
B. Perencanaan Pembangunan	20
C. Musrenbang	24
D. Infrastruktur Kelurahan	32
III. Metode Penelitian	35
A. Desain Penelitian	35
B. Jenis Data dan Sumber Data	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Analisis Data	37
1. Analisis Univariat	37
2. Analisis Bivariat	38

IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Kondisi Umum Lokasi Penelitian	40
1.	Geografi	40
2.	Demografis	41
3.	Kesejahteraan Masyarakat	42
a.	Perekonomian	43
b.	Kesejahteraan Sosial	45
B.	Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan Mlipak	50
C.	Analisis Hubungan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	54
1.	Usia	55
2.	Tingkat Pendidikan	56
3.	Pekerjaan	57
4.	Tingkat Penghasilan	58
5.	Lamanya Tinggal	59
6.	Tingkat Komunikasi	60
7.	Kepemimpinan	61
D.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	63
V.	SIMPULAN DAN SARAN	65
A.	Simpulan	65
B.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN	70

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berarti masyarakat memiliki hak dalam menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam proses demokratisasi inilah masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut untuk menjamin dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Sudah sepatutnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi, nantinya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan.

Salah satu bentuk nyata dari pemberian ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam menentukan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan adalah melalui forum Musrenbang. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. Tujuan diadakannya musrenbang yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Musrenbang menjadi salah satu ruang publik yang berguna untuk menampung usulan masyarakat serta keluhan masyarakat berkaitan dengan arah pembangunan yang akan dilakukan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Musrenbang juga merupakan forum bagi masyarakat untuk berperan aktif sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan pemerintah atau rencana pembangunan jangka pendek yang berlaku pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Rencana pembangunan jangka panjang yang disingkat yaitu dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah yaitu dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 5 tahun, sedangkan rencana pembangunan tahunan atau rencana pembangunan jangka pendek yaitu dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu pelaksanaan 1 tahun yang disebut juga dengan rencana kerja pemerintah yang berlaku pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dokumen perencanaan disusun mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk 20 tahun, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 tahun, dan dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Diantara proses penyusunan perencanaan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan untuk diselesaikan dan usulan kebutuhan untuk dipenuhi adalah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan forum musrenbang secara berjenjang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan pada surat edaran bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri nomor 8 tahun 2007 yaitu untuk menyusun RKPD perlu diadakannya Forum musrenbang secara berjenjang mulai dari musrenbang tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten hingga pada tingkat provinsi untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat kelurahan/desa merupakan forum yang paling penting karena bersentuhan langsung pada masyarakat. Segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat bisa langsung disampaikan melalui forum musrenbang kelurahan/desa sehingga dengan adanya musrenbang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam praktiknya, proses Musrenbang di tingkat kelurahan didahului dengan persiapan yaitu melalui pembahasan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan hingga bermuara pada saat pelaksanaan musrenbang kelurahan. Keterlibatan masyarakat tidak

hanya sekedar ikut menentukan dan mendukung kebijakan yang diberlakukan pemerintah akan tetapi keterlibatan tersebut berupa menentukan arah strategi kebijakan, terlibat menikmati hasil dan manfaat yang diperoleh serta terlibat memikul tanggung jawab bersama-sama dalam proses pelaksanaannya.

Pada dasarnya musrenbang menjelaskan gambaran bagaimana forum tersebut melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran. Dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan tersebut, masyarakat bebas mengemukakan pendapat, saran, dan usulan serta diajak berdialog dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sastropoetra (1998:23) bahwa masyarakat wajib dikonsultasikan dan reaksi/responnya harus pula diperhitungkan dalam proses perencanaan.

Menurut Conyers (1991:154-155), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena masyarakat lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, yang mendorong adanya partisipasi masyarakat karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pada proses perencanaan pembangunan dapat ditilik salah satunya dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan. Antusias masyarakat dalam menghadiri pelaksanaan Musrenbang kelurahan dapat diartikan sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan dan kemajuan pembangunan di daerahnya. Selain itu, kehadiran masyarakat sebagai peserta aktif dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan mengandung makna terciptanya hak masyarakat dalam demokrasi.

Musrenbang kelurahan bagi organisasi kelurahan adalah bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan di daerah untuk merumuskan kegiatan-

kegiatan pembangunan terutama yang menjadi kewenangannya. Hasil musrenbang kelurahan akan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Kelurahan dan merumuskan prioritas permasalahan dan indikasi kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk diajukan ke musrenbang kecamatan. Selain itu, sebagai bagian fungsi kelurahan untuk mendorong urusan kemasyarakatan, musrenbang kelurahan pun dapat menjadi sarana bagi pemerintah kelurahan dengan masyarakat untuk merumuskan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat kelurahan maupaun kegiatan yang diusulkan untuk diajukan dibiayai melalui pos bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada pelaksanaannya, masyarakat di Kelurahan Mlipak belum memanfaatkan forum musrenbang kelurahan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran para pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Mlipak pada saat pelaksanaan musrenbang tahun 2018 yang hanya sejumlah mencapai 45% dibandingkan jumlah peserta yang diundang untuk hadir dalam forum musrenbang. Padahal dengan semakin banyak yang hadir dalam forum musrenbang diharapkan akan semakin banyak pula permasalahan, saran, dan usulan yang disampaikan sebagai bahan kebijakan pembangunan tahunan.

Permasalahan, saran dan usulan yang diharapkan disampaikan dalam forum musrenbang sebagian besar adalah masalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan suatu wilayah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan pentingnya partisipasi masyarakat, penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur juga perlu mengikutsertakan masyarakat. Salah satu ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut melalui forum Musrenbang. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, maka informasi berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan infrastruktur suatu wilayah akan tepat sasaran.

Hasil pelaksanaan Musrenbang tahun 2018 di Kecamatan Wonosobo yang terdiri dari enam desa dan 14 kelurahan di Kecamatan Wonosobo, usulan pembenahan infrastruktur dasar berupa sarana fisik masih mendominasi. Berdasar data rekapitulasi, dari total Rp 49 miliar anggaran yang diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), hampir 95 % di antaranya dialokasikan untuk proyek fisik seperti jalan, senderan, atau renovasi gedung.. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur dari tahun ke tahun masih memerlukan alokasi anggaran yang besar. Adanya alokasi anggaran yang besar tersebut juga mengindikasikan bahwa kondisi infrastruktur yang ada masih belum memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu kelurahan yang berada di wilayah perkotaan Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Mlipak memiliki luas wilayah 123,2424 ha. Dari luas wilayah tersebut, Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo memiliki akses jalan sepanjang 19,5 km dengan kondisi jalan sebagian besar mengalami rusak sedang. Demikian pula dengan kondisi lingkungan masyarakat yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria lingkungan sehat perkotaan. Hal ini dapat diketahui dari tercantumnya Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo dalam Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 653/247/2014 tentang Lingkungan Pemukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Wonosobo ke dalam salah satu kelurahan dengan wilayah lingkungan kumuh di Kabupaten Wonosobo. Buruknya kondisi drainase dan infrastruktur sarana umum di wilayah Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo menjadi bagian yang tidak terlepas dari penyebutan Kelurahan Mlipak yang masuk dalam kategori kelurahan kumuh tersebut.

Kondisi infrastruktur dan lingkungan yang demikian sudah semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi peran aktif dan partisipasi masyarakat melalui forum musrenbang juga dapat dioptimalkan sehingga permasalahan tersebut dapat digali dan diusulkan menjadi prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di wilayah Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo.

Berdasarkan uraian di atas, untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan yang ada di wilayah Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo, maka penelitian ini memfokuskan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mlipak

Kecamatan Wonosobo untuk Menggali Gagasan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

B. Perumusan Masalah

Penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan suatu wilayah, harus memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mutlak diperlukan karena masyarakat di wilayah tersebut yang lebih mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Namun pada pelaksanaannya, forum Musrenbang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh warga masyarakat sebagai wadah untuk ruang partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penulis mengajukan pertanyaan untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Mlipak;
- b. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Mlipak.

E Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, maupun bagi pemerintahan antara lain :

- a. Bagi pemerintah; sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- b. Bagi masyarakat; memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan tentang pentingnya partisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Bagi penulis; sebagai gambaran, pembelajaran, dan pengalaman mengenai tingkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

Secara umum, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan peran serta dalam suatu kegiatan. Berdasarkan Kamus Tata Ruang (1998), partisipasi didefinisikan sebagai peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk beminat dan bergerak di penyelenggaraan tata ruang. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada tata ruang saja, akan tetapi dapat berlaku juga untuk hal lain dimana terdapat keterlibatan dan peran serta seseorang dalam suatu kegiatan.

Menurut Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedangkan menurut Isbandi (2007: 27), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Rowe dan Freyer dalam Marijan (2011:110) partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan. Sedangkan menurut Sihombing dalam Khairuddin (2000:127) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Hal ini menurut Slamet (1996:137) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi penting, karena :

1. Masyarakat adalah fokus sentral dan tujuan akhir dari kegiatan pembangunan;
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting menyangkut masyarakat;
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi suatu daerah yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
5. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
6. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri;
7. Partisipasi merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek akan gagal;

Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan, dan aspirasi yang dimiliki baik secara individu maupun komunal. Dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari suatu massa penduduk pada tingkatan-tingkatan atau tahapan yang berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Slamet (1994:97), yaitu :

1. Dalam proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara suka rela.
3. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dilihat dari satu aspek saja, akan apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

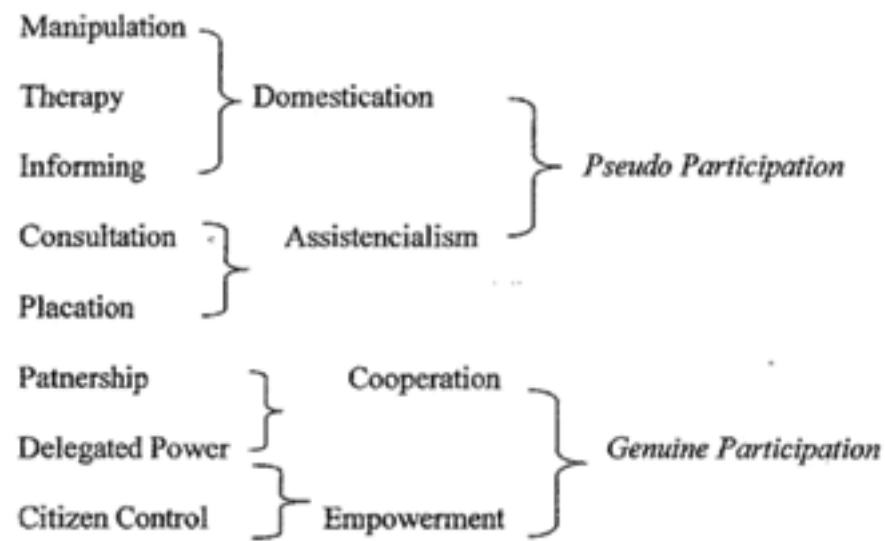
1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berbeda pada tempat dan kondisi tertentu. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dapat diidentifikasi tingkatan partisipasi masyarakat dalam suatu daerah. Arnstein dalam Sirajuddin (2011:172) menggolongkan partisipasi masyarakat yang memiliki wewenang untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam hal ini partisipasi digambarkan dengan membuat delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggi yaitu kekuasaan warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. Sedangkan derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi.

Deshler dan Shock dalam Selener (2001:19) mengemukakan sebuah kerangka tentang perbedaan jenis partisipasi. Menurut mereka partisipasi dapat

dikelompokkan dalam dasar tingkat pengendalian dari partisipasi, dengan menggunakan kiasan tangga yang digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



GAMBAR 2.1
TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Sumber : Deshler and D. Shock dalam Selener (2001:21)

Berdasarkan gambar tersebut, secara garis besar tingkatan partisipasi masyarakat digolongkan dalam empat tingkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Partisipasi sebagai pelayan (*Domestication*), dalam partisipasi model ini kekuasaan dan pengendalian berada pada perencana, administrasi elit lokal ahli, dan profesional. Partisipasi dapat tercapai dengan menggunakan teknik partisipasi semu yaitu memanipulas masyarakat untuk melakukan apa yang orang luar anggap atau merasa penting untuk dilakukan bagi keuntungan kepentingan manfaat anggota, padahal mereka sendiri tidak dilibatkan.
- b. Partisipasi sebagai pertolongan (*Assitencialism*), dalam partisipasi model ini dasar pemikiran yang rasional sebagai perbantuan atau pertolongan sedangkan kekuasaan dan pengendalian berada pada agent luar atau penguasa. Anggota berpartisipasi dalam kelompok menerima informasi dan membicarakan, serta membantu pihak penguasa. Peneliti berfokus hanya membantu kelompok dalam menyelesaikan masalah penyakit sosial. Anggota merasa sebagai objek yang pasif, tidak mampu berbicaraaktif

dalam bagian proses partisipasi. Mereka diberitahu aktifitas kegiatan tetapi tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau pengendalian yang menguntungkan.

- c. Partisipasi sebagai kerjasama (*Cooperation*), partisipasi model ini melibatkan orang bekerja sama dengan orang luar untuk mengimplementasikan, dengan penekanan bahwa semua anggota diuntungkan. Keputusan diambil melalui musyawarah antara orang dalam dan orang luar. Anggota juga aktif dilibatkan dalam keseluruhan program. Kekuasaan dan pengendalian dibagi dalam proyek, idealnya termasuk pendekatan dari bawah keatas.
- d. Partisipasi sebagai pemberdayaan (*Empowerment*), adalah model pendekatan partisipasi yang mana masyarakat secara penuh dilibatkan atau diberdayakan meliputi pemberian kekuasaan dalam pengendalian program atau kelembagaan, termasuk pengambilan keputusan dan aktifitas administrasi. Partisipasi terjadi pada tingkat politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Klasifikasi tingkatan partisipasi tersebut, secara rinci sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein dalam Wicaksono (2010:25) yang menjelaskan delapan tingkatan partisipasi sebagai berikut :

a. *Manipulation*

Merupakan keterlibatan dan peran masyarakat tidak ada sama sekali, dan kekuasaan berada di tangan sepenuhnya.

b. *Therapy*

Pemerintah mengatur segala sesuatunya dan masyarakat merupakan objek program sehingga tidak ada partisipasi.

c. *Informing*

Pada tingkatan ini masyarakat mulai memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pemerintah, namun tetap belum terlibat aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program.

d. *Consultation*

Pada tingkatan ini, mulai terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak satu dengan pihak lainnya yang memungkinkan keterlibatan dalam suatu program.

e. *Placation*

Pada tingkatan ini masyarakat yang ikut, terlibat, dan berpartisipasi dalam program akan mendapat imbalan berupa plakat.

f. *Partnership*

Merupakan tingkatan partisipasi yang ideal, pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam tahapan pelaksanaan program. Pada tingkatan ini memungkinkan setiap individu berpartisipasi penuh dengan menyampaikan ide serta aspirasinya.

g. *Delegated Power*

Pada tingkatan ini, masyarakat mulai diberikan kekuasaan sehingga kedudukan pemerintah berada di bawah rakyat.

h. *Citizen Control*

Pada tingkatan partisipasi ini masyarakat memegang kekuasaan tertinggi secara penuh dan sebagai akibatnya muncul kegiatan-kegiatan yang menjurus anarki.

Identifikasi tingkatan partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk mendapat gambaran tingkatan partisipasi masyarakat dalam dinamika kelompok untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tinggi rendahnya tingkatan partisipasi suatu masyarakat tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkatan partisipasi masyarakat dalam suatu program. Sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell dalam Ross (1967:130) mengemukakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari internal maupun faktor eksternal dalam suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar

partisipasi internal sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggalan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Berdasarkan hasil identifikasi tingkatan partisipasi masyarakat suatu daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhinya, maka partisipasi diarahkan untuk mencapai tingkatan yang ideal. Dalam mencapai tingkatan partisipasi yang ideal tidak bisa terjadi dengan serta merta. Hal ini berarti perlu adanya upaya yang bisa dilakukan guna mencapai tingkatan partisipasi yang ideal tersebut. Menurut Burke (2004:54), terdapat enam strategi dalam pengimplementasian partisipasi masyarakat untuk mencapai tingkatan partisipasi yang ideal. Keenam strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut meliputi :

a. Strategi Terapi Pendidikan

Fokus perhatian dari strategi ini adalah pada anggapan bahwa dibutuhkan perbaikan terhadap para partisipan secara individu. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam urusan kemasyarakatan yang memerlukan partisipasi dari individu partisipan tersebut. Pada konteks ini kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk pelatihan kewarganegaraan, dimana para warga yang bekerja sama memecahkan berbagai persoalan kelompok tidak hanya belajar bagaimana demokrasi bekerja, tetapi belajar pula menilai dan menghargai kerja sama sebagai suatu metoda untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat memperkuat pemerintah lokal, mendorong pembangunan kelompok, dan menciptakan kekeluargaan didalam kelompok.

Kelemahan strategi ini adalah yang pertama, sangat sulitnya mengakomodasikan strategi ini dengan tuntutan organisasi. Untuk memberikan perhatian utama pada kebutuhan hidup salah satu kelas suatu anggota organisasi merupakan tindakan yang dapat mengganggu fungsi organisasi tersebut. Kedua, para partisipan yang terdiri dari para warga dengan sendirinya akan berorientasi pada pelaksanaan tugas. Mereka secara mutlak akan menolak metoda yang yang fokus pada kebutuhan pendidikan mereka.

b. Strategi Perubahan Perilaku

Tujuan strategi ini adalah untuk mendorong terjadinya perubahan pada sistem atau sub sistem melalui perubahan perilaku, baik anggota sistem maupun perwakilan berpengaruh dari sistem tersebut. Kelompok dipandang sumber berpengaruh bagi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, dengan

memusatkan perhatian pada standar kelompok, seperti cara kepemimpinannya atau atmosfer emosionalnya maka perubahan perilaku anggota individunya dianggap memungkinkan. Kelompok itu sendiri menjadi sasaran perubahan walaupun tujuannya adalah untuk mengubah perilaku anggota individunya. Penekanan inilah yang membedakan strategi ini dengan strategi terapi pendidikan. Terdapat dua dasar pemikiran pada strategi ini, yang pertama akan lebih mudah mengubah perilaku seorang individu bila individu itu merupakan anggota suatu kelompok daripada mengubah individu tersebut secara terpisah-pisah. Kedua, individu dan kelompok akan menolak keputusan yang dipaksakan kepada mereka.

c. Strategi Penambahan Staf

Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa perencanaan merupakan keahlian yang terbatas. Dia dapat memiliki pengetahuan yang bersifat konsep dan analitis tetapi dia bukan ahli dalam semua permasalahan substantif yang melibatkan dirinya.

Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi kebijaksanaan, kemampuan, waktu senggang, serta pengetahuan keahlian yang dimiliki oleh para warga sukarela. Warga dipandang sebagai anggota staf yang sedang menjalankan peran dan tanggung jawab yang dibutuhkan guna mencapai sasaran dari suatu tugas perencanaan serta misi dari lembaga perencana. Warga dapat memberikan kerangka kerja dan latar belakang dimana permasalahan dan prioritas dapat teridentifikasi.

d. Strategi Kooptasi

Tujuan strategi ini adalah warga dilibatkan dalam organisasi guna mencegah terjadinya gangguan yang telah diketahui sebelumnya dan warga dipandang sebagai unsur potensial yang dapat mengganggu atau membuat frustrasi, dimana kerja sama atau ijinnya memang dibutuhkan. Keuntungan mereka dilibatkan pada tingkat pembuatan kebijakan karena pengaruh yang mereka miliki sangat penting untuk keberlangsungan kebijakan organisasi yang telah ada. Kooptasi hanya dapat menggambarkan suatu teknik pengangkatan, dimana pertukaran tanggung jawab memberikan keuntungan secara eksklusif kepada organisasi itu.

e. Strategi *Community Power*

Power didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan kemauannya, bahkan bila terjadi pertentangan dari pihak yang lain. Terdapat dua strategi dalam *Community Power*, pertama dengan mengangkat pihak yang berpengaruh dapat memberkan kekuatan dan pengaruh kepada orang lain. Kedua, pihak yang berpengaruh akan berpartisipasi pada organisasi yang dapat mempertahankan atau meningkatkan status mereka sebagai pihak yang berpengaruh.

f. Strategi Advokasi

Tingkat keefektifan strategi ini terlihat semakin terbatas dengan berjalannya waktu. Usaha untuk mempertahankan ketertrikan warga telah menjadi kesulitan yang utama. Organisasi hanya memiliki sasaran, maksud ideal untuk mempertahankan ketertarikan pada sasaran yang idealis dalam jangka yang panjang. Secara pribadi, komitmen yang dibutuhkan secara emosional sangat melelahkan. Sering kali pemimpin organisasi terpaksa bergantung kepada desakan atau pembuatan krisis agar ketertarikan tercipta kembali. Jumlah anggota akan menurun atau sering kali organisasi berubah, mereka cenderung kurang mengandalkan taktik konflik dan lebih mengandalkan kerja sama.

Berdasarkan uraian identifikasi enam strategi partisipasi tersebut, ketepatan dan keefektifan strategi sangat bergantung pada dua kondisi. Pertama kondisi organisasi, yaitu misi, bantuan, serta sumber daya suatu organisasi. Tidak semua strategi tepat untuk diterapkan bagi semua organisasi. Strategi yang berorientasi pada konflik, yang bergantung pada proses masyarakat sangat tidak tepat bagi perencanaan umum. Strategi yang tepat bagi perencanaan umum dan sebagian besar lembaga perencanaan adalah strategi perubahan perilaku dan penambahan staf. Kedua, yang menentukan keefektifan dan ketepatan suatu strategi partisipasi adalah peran spesifik yang diberikan kepada warga dalam organisasi perencanaan. Peran yang tepat untuk strategi penambahan staf adalah sebagai penasihat atau pengambilan keputusan secara bersama. Penekanannya adalah bahwa strategi partisipasi yang diterapkan akan menentukan struktur peran warga di dalam organisasi perencanaan.

B. Perencanaan Pembangunan

Secara umum perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Menurut Waterson dalam Conyers (1994:4), pada hakekatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kunarjo (2002:14) secara umum perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Tjokroamidjojo (1998:12) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum Output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain itu, perencanaan juga merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Berdasarkan beberapa pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan.

Menurut Koontz dan O'Donnel (1972:69), perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif yang ada. Sedangkan Allen dalam Siswanto (2005:45) mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, dikemukakan juga 6 langkah atau proses dalam perencanaan, yaitu:

1. Perumusan tujuan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya - sumber dayanya secara tidak efektif.

2. Perumusan masalah

Kegiatan ini sangat penting, hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.

3. Melakukan analisa

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.

4. Pengembangan alternatif

5. Pemilihan alternatif

yaitu pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

6. pengembangan rencana derivative

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Berkaitan dengan apa saja yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai, perencanaan perlu dilakukan dalam berbagai bidang. Dalam pencapaian tujuan kehidupan nasional yang dilakukan dengan upaya pembangunan juga perlu direncanakan. Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan

untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan (Riyadi dkk, 2005:7). Masyarakat merupakan sasaran dan tujuan utama dalam perencanaan pembangunan karena seharusnya masyarakat yang menjadi penerima dan menikmati manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo (1996:14), perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Menurut Conyers (1994:5) setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapat dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan yang strategis. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan bersifat tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta kondisi nyata di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan, konsep perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu daerah yang meliputi komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, serta berpegang pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer

merupakan instrumen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia telah diterapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an. Mekanisme perencanaan tersebut menggunakan kombinasi antara pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) dan dari atas (*top down approach*). Dalam mekanisme perencanaan tersebut terdapat enam tahap yang dilalui, mulai dari musyawarah pembangunan desa (musbangdes), diskusi unit daerah kerja pembangunan (UDKP) di tingkat kecamatan, rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) di tingkat kabupaten/kota, rakorbang tingkat propinsi, konsultasi regional pembangunan (konregbang), dan konsultasi nasional pembangunan (konasbang).

Perluasan otonomi daerah yang semakin dititikberatkan kepada kabupaten/kota akan membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, baik dalam tahap perumusan kebijakan maupun implementasi program-program pembangunan. Oleh karena itu, model pembangunan daerah di masa kini dan masa depan perlu difokuskan kepada pengembangan masyarakat lokal. Model pembangunan itu dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan top down ke pembangunan partisipatif.

Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-

program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan dalam pelaksanaannya.

C. Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, jenjang perencanaan menurut jangka waktu pelaksanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12) , maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16) pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman bagi penyusunan APBD yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi pokok sebagai : (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan public, (2) Pedoman dalam penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, dan (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Sehubungan hal tersebut, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD. Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bisa terjadi manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat ke depan. Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

1. Menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai kesepakatan Musrenbang.
3. Melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Mengembangkan dan memperkuat proses partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Mengembangkan dan memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Merupakan media interaktif bagi segenap *stakeholders* daerah untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.
7. Membangun komitmen bersama diantara *stakeholders* dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, partipatif, transparan dan akuntabel.
8. Menciptakan program-program inovatif dalam perencanaan pembangunan kedepan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang berlaku prinsip-prinsip yang harus diikuti baik untuk fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kesetaraan; peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.
2. Prinsip musyawarah dialogis; peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

3. Prinsip keberpihakan; dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.
4. Prinsip anti dominasi; dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
5. Prinsip pembangunan secara *holistic*; Musrenbang dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Secara ideal, mekanisme Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan terendah pada kelurahan. Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap periode perencanaan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan yang telah disusun untuk 5 tahun ke depan.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Oleh karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Berbeda dengan seminar atau sosialisasi informasi, proses musrenbang jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari waktunya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidato. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembung dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah lainnya yang erelevan dengan usulan yang ada.

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang pada tingkat Kelurahan yaitu:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kelurahan
2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah.
4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/kota atau APBD provinsi.
5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah tahun berikutnya.

Hasil dari pelaksanaan Musrenbang kelurahan didokumentasikan secara administratif sebagai bukti adanya partisipasi dan kesepakatan bersama masyarakat. Dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD kelurahan.
2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya.

3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan.
4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
5. Berita acara musrenbang kelurahan.

Dalam pelaksanaannya, proses musrenbang kelurahan meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi pra musrenbang, pelaksanaan, dan pasca musrenbang. Pada tahapan pra musrenbang ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk penyelenggaraan, antara lain :

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah;
2. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga);
3. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
4. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kelurahan;
5. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan;
6. Melakukan musyawarah/rembug dusun/RW;
7. Daftar prioritas masalah dari tingkat di bawah Kelurahan;
8. Peta potensi dan permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll.);
9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan;
10. Informasi dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan dialokasikan Kelurahan yang bersangkutan;
11. Informasi dari Pemerintah Kota tentang isu-isu strategis daerah;
12. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi;
13. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya;
14. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, atau organisasi tani/nelayan dan pedagang.

Setelah tahapan pra musrenbang sebagai persiapan selesai, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan musrenbang sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan. Pada tahapan pelaksanaan ini kegiatan terdiri atas :

1. Pendaftaran peserta;

2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan;
3. Lurah mempresentasikan prioritas masalah Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan);
4. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
5. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan);
6. Menyampaikan informasi tentang isu-isu strategis Kota;
7. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasikan;
8. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan;
9. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, Ketua RW / RT dan lain-lain.
10. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
11. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
12. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan.
13. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb:
 - a. Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.
 - b. Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.
 - c. Pemilihan/pengambilan suara.
 - d. Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi

- e. Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan

14. Berita acara Musrenbang Tahunan.

Pada saat pelaksanaan musrenbang kelurahan, turut hadir pula sebagai narasumber antara lain Lurah, Ketua dan para anggota LPM, Camat dan aparat Kecamatan, Kepala sekolah, Kepala puskesmas, Pejabat instansi yang ada di Kelurahan, dan LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan. Selain itu musrenbang kelurahan diikuti oleh partisipan dari seluruh komponen masyarakat yang berada di kelurahan, seperti ketua RT/RW; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelompok Perempuan, keterwakilan kelompok usia, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan keterwakilan berbagai sektor.

Setelah musrenbang selesai dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya adalah pasca musrenbang dimana tim delegasi bersama dengan tim penyelenggara musrenbang melakukan rapat kerja finalisasi dokumen Renja SKPD Kelurahan, Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan, dan Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan.

D. Infrastruktur Kelurahan

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Tjokroamidjojo, 1978:65). Infrastruktur merupakan istilah yang sudah tidak asing di masyarakat sebagaimana pemerintah senantiasa berupaya membangun dan memelihara infrastruktur guna meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut Grigg (1988:52), infrastruktur adalah system fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Sedangkan menurut Stone dalam Kodoatie, (2003:187) infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-

agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal transportasi, tenaga listrik, penyediaan air, pembuangan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa. Berdasarkan pengertian ini, infrastruktur tidak hanya berbentuk fasilitas umum yang berupa fisik saja akan tetapi mencakup kesatuan fasilitas publik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun sosial.

Infrastruktur juga tidak hanya mencakup penopang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, infrastruktur juga mencakup system kehidupan masyarakat dengan lingkungannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kodoatie (2005:8) bahwa infrastruktur adalah system yang menopang system sosial dan sistem ekonomi sekaligus yang sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan, dimana system ini dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan beberapa definisi infrastruktur tersebut, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Infrastruktur publik merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan kompensasi dari pembayaran atau iuran pajak oleh warga Negara. Infrastruktur publik sangat penting keberadaannya karena sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut B.S Muljana (2001:3), pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pendekatan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Kondisi ini berasal dari sistem budaya masyarakat tersebut yang selanjutnya mempengaruhi cara berpikir dan respon mereka terhadap pembangunan itu sendiri.

Secara sederhana, sesungguhnya dapat dikatakan apapun pendekatan pembangunan yang dilakukan hasilnya untuk meningkatkan kebutuhan dasar manusia, semua hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan terutama pembangunan fisik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (Khairuddin, 2000). Peningkatan kesejahteraan ini tidak lain adalah peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menurut Hendra Esmara dan Tjokroamidjojo, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar keluarga atau individu, seperti: pangan, perumahan, sandang, dan beberapa peralatan rumah tangga.
2. Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, seperti air minum, sanitasi, pengangkutan umum dan kesehatan, fasilitas pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Mashoed (2004:40) salah satu program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan perbaikan fisik lingkungan (prasarana) pemukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran, fasilitas persampahan, dan MCK umum. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Pembangunan fisik yang dimaksudkan agar setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana maupun fasilitas umum.

Dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek pembangunan fisik. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan

kegiatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembangunan. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005:18), dalam proses pembangunan ada lima dimensi yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan;
 - a. Sosial,
 - b. Budaya,
 - c. Ekonomi,
 - d. Politik,
2. Faktor sumber daya manusia perencana;
3. Faktor sistem yang digunakan (strategi);
4. Faktor Perkembangan ilmu dan teknologi; dan
5. Faktor pendanaan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik penelitian, desain penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tipe penelitian ini berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau organisasional), kejadian, atau prosedur. Sedangkan metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei merupakan teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya jawab (Indriantoro dan Supomo, 2002:12).

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan untuk mengukur derajat partisipasi dalam Musrenbang, serta hubungan antara faktor-faktor baik internal maupun eksternal terhadap yang tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada sejumlah warga masyarakat di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo maupun dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada berupa laporan, data atau dokumen dari berbagai instansi yang berhubungan dengan topik penelitian (Sekaran, 2006:60).

C. Populasi dan Sampel

Problematika yang ada dalam pemilihan data kuantitatif umumnya berkaitan dengan populasi data yang diteliti. Populasi (*population*), yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah RT yang ada di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 35 RT. Penentuan ukuran sampel dilakukan berdasarkan pendapat Slovin yang sering digunakan dalam penelitian di berbagai bidang (Slovin dalam Umar, 1998:78). Pendapat tersebut disajikan dalam persamaan berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi RT

e = *error of estimate* (kesalahan yang dapat ditoleransi dalam *level of confidence* tertentu)

Berdasarkan data jumlah RT di Kelurahan Mlipak Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 35 RT, dengan *error of estimate* 10 % (Umar, 1998:78) maka diperoleh ukuran sampel sejumlah 35 RT. Ukuran sampel tersebut dibagi dalam 9 RW di Kelurahan Mlipak sehingga tiap RW terdapat 4 RT sebagai sampel.

D. Metoda Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu penelitian. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang mengisi kuesioner berisi daftar pertanyaan tentang yang telah diberikan kepada responden (Saryono, 2008:78). Lembar kuesioner berisi pertanyaan tentang identitas responden berupa nomor responden, jenis kelamin, umur responden, alamat, lama tinggal, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Saryono, 2008:78). Data sekunder ini diperoleh dari Instansi terkait seperti Kelurahan Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Bappeda Kabupaten Wonosobo, dan BPS Kabupaten Wonosobo.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah (Saryono, 2008:77). Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010:203). Kuesioner berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pendapat responden tentang derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Mipak serta hubungan antara faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.

Kuesioner berbentuk pilihan dimana jawabannya telah disediakan (*closed ended*). Alat ukur terdiri dari bagian yaitu bagian pertama berisi karakteristik responden meliputi nomor responden, jenis kelamin, umur responden, alamat, lama tinggal, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Bagian kedua berisi pendapat responden tentang keterlibatan dan keaktifan dalam pelaksanaan Musrenbang.

F. Analisis Data

Analisis data disesuaikan dengan tujuan dan skala data dari variabel yang akan diuji. Adapun tehnik yang digunakan :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dalam tiap variabel (Notoatmodjo, 2010:182). Dalam penelitian ini analisis univariat dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang untuk tiap-tiap faktor. Adapun rumus distribusi frekuensi menurut Budiarto (2002:37) dalam pesentase yaitu sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum f x}{n}$$

Keterangan :

- \bar{x} = Rata-rata
 f = frekuensi
 x = hasil pengamatan
 n = jumlah pengamatan

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau korelasi (Notoatmodjo, 2010:183). Dalam penelitian ini analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistika yaitu *chi square*. *Chi square* ini digunakan untuk menganalisis hubungan variabel kategorik dengan kategorik. Pada penelitian ini hubungan yang dianalisis adalah variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, lama tinggal, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang. Variabel tersebut ditentukan sebagai variabel kategorik, pembuktian uji *chi square* menurut Riyanto (2009), menggunakan formulasi :

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

χ^2 = Nilai chi-kuadrat

f_o = frekuensi yang diobservasi (frekuensi empiris)

f_e = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis)

Rumus mencari frekuensi teoritis (f_e):

$$f_e = \frac{(\sum f_k) \times (\sum f_b)}{\sum T}$$

f_e = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis)

$\sum f_k$ = jumlah frekuensi pada kolom

$\sum f_b$ = jumlah frekuensi pada baris

$\sum T$ = jumlah keseluruhan baris atau kolom

Prosedur penelitian *chi square* menurut Riyanto (2009:75) sebagai berikut:

- 1) Memformulasikan hipotesisnya (H_o dan H_a).
- 2) Memasukkan frekuensi observasi (f_o) dalam tabel silang.
- 3) Menghitung frekuensi harapan (f_e) dalam masing-masing sel.

- 4) Menghitung sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Menghitung p value dengan membandingkan alpha.
- 6) Membuat keputusan :
 - (a) Bila p value $\leq \alpha$, H_0 diterima, berarti data sampel mendukung adanya perbedaan yang signifikan.
 - (b) Bila p value $> \alpha$, H_0 di tolak, berarti data sampel tidak mendukung adanya perbedaan yang signifikan. Berarti tidak ada hubungan yang bermakna (signifikan) antara jenis kelamin, umur responden, alamat, lama tinggal, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Penentuan nilai α (alpha) tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian (Rianto, 2009:75). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan level of significance ($\alpha = \text{alpha}$) sebesar 5% (0,05).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat